Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi anggaran dana desa pada Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

Hatta Abdi Muhammad*¹ dan Nopyandri²

¹Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jambi

²Faculty of Law, Universitas Jambi

* hattaabdimuhammad@gmail.com

Abstrak. Anggaran dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dibagikan secara proporsional kepada setiap desa. Dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh mitra bahwa masyarakat Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi secara substantif belum memiliki inisiatif untuk berkontribusi dalam pengelolaan anggaran dana desa dan pengembangan potensi desa. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi anggaran dana desa. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan melakukan sosialisasi, monitoring serta controlling terhadap mitra pengabdian yakni Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yang berdampak pada keikutsertaan masyarakat terhadap pengembangan potensi desa sehingga pembangunan desa berlangsung secara partisipatif dan mensejahterahkan.

Kata kunci: pengelolaan anggaran dana desa; partisipasi masyarakat; Desa Tanjung Lanjut

Abstract. The village budget is a central and regional financial balance fund that is distributed proportionally to each village. Village funds are aimed at organizing village governance and community empowerment. The constraints faced by partners were that the community of Tanjung Lanjut in Sekernan Subdistrict, Muaro Jambi Regency had substantially no initiative to contribute to the management of village budget funds and the development of village potential. The paternalistic culture of the village community caused the community to be indifferent and to give full trust to the village head towards managing the budgetary allocation of village funds. The method used in this service is by conducting socialization, monitoring and controlling of service partners, namely Tanjung Lanjut Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency. Based on the results of the service conducted, there was an increase in knowledge and the level of community participation in managing village budget funds which had an impact on community participation in the development of village potential so that village development took place in a participatory and prosperous manner.

Keywords: village fund budget management; people's participation; Tanjung Lanjut Village

To cite this article: Muhammad, H. A., & Nopyandri. 2019. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi anggaran dana desa pada Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Unri Conference Series: Community Engagement 1*: 89-94. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.89-94>

© 2019 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2019

PENDAHULUAN

Salah satu visi besar kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode tahun 2014 – 2019 ialah meletakkan program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wewenang Pemerintah Pusat dalam memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pembangunan desa yang dibuktikan dengan kebijakan pengalokasian anggaran APBN untuk desa yang pada setiap tahunnya semakin meningkat (Susetawan, Mulyono D.C and Roniardin M.Y : 2018).

Penyediaan anggaran dana desa melalui APBN merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap kemandirian desa dan menjadikan desa otonom yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Lebih jauh, anggaran dana desa merupakan bentuk pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang diantaranya mencakup : a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BumDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup layak; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat desa; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (S. M. Tumbe : 2018). Pada praktiknya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat termasuk kelompok marginal. Hal itu bertujuan agar pembangunan yang direncanakan benar-benar bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat di dalam desa tersebut.

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1. Kepemimpinan 2. Komunikasi, 3. Pendidikan (Tjokroamidjojo : 2015). Perencanaan dan pelaksanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan. Usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu :

1. Pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat setempat.
2. Penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan.
3. Pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan.
4. Pembinaan organisasi Pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional).
5. Pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang member iklim yang serasi untuk pembangunan (M. Slamet : 2013).

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi berlokasi di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa desa tersebut belum dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dana desa secara partisipatif. 2 (dua) faktor utama rendahnya tingkat partisipasi masyarakat desa yaitu (1) Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi anggaran dana desa. (2) Tingkat pemahaman masyarakat Desa Tanjung Lanjut masih dalam skala rendah sehingga masyarakat desa lebih banyak diam dan menerima hasil yang tidak mampu memberikan kesejahteraan yang meningkat.

Dampak dari perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa serta pembangunan yang belum partisipatif di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi adalah manfaat pembangunan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa, padahal pelaksanaan pembangunan desa belum dapat disebut berhasil apabila masih ada sebagian warga masyarakat yang belum merasakan manfaat dari proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan anggaran dana desa yang berdampak pada kemajuan pembangunan desa yang partisipatif, Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi mengajak masyarakat desa di Desa Tanjung Lanjut beserta pemerintah desa

untuk belajar bersama-sama tentang pentingnya pengelolaan anggaran dana desa yang partisipatif melalui tahapan kegiatan sosialisasi, monitoring dan controlling yang diselenggarakan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan Desa Tanjung Lanjut kedepan benar-benar menjadi desa yang mandiri, otonom dan mensejahterahkan masyarakatnya.

MASALAH

Masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi adalah pengelolaan perencanaan anggaran dana desa yang masih bersifat elitis dan belum melibatkan semua komponen masyarakat desa. Di samping itu, masyarakat Desa Tanjung Lanjut secara substantif juga belum memiliki inisiatif untuk berkontribusi dalam pengelolaan anggaran dana desa dan pengembangan potensi desa.

Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi melalui rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi, monitoring, dan controlling menawarkan solusi kepada mitra dalam pengelolaan anggaran dana desa yang partisipatif meliputi: (a) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; (b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga; (c) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya tata cara pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa; dan, (d) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.

METODE PENERAPAN

Kegiatan penguatan partisipasi masyarakat desa dalam tahapan sosialisasi, monitoring, dan controlling hasil pengelolaan potensi anggaran dana desa dilaksanakan dengan metode partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelatihan peningkatan pemahaman tentang undang-undang desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga.
3. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya tata cara pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa.
4. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.
5. Simulasi atau praktik penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif melalui pengelolaan anggaran dana desa

Dalam rangkaian tahapan metode pengabdian kepada masyarakat tersebut, tim pelaksana mengundang para narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan desa baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta pengelolaan dan perencanaan keuangan desa. Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan dari awal bulan Januari 2019 hingga bulan Juni 2019. kegiatan yang diselenggarakan diperuntukkan kepada perwakilan masyarakat dari beberapa elemen seperti kelompok tani, kelompok rentan (perempuan, miskin, difabel dan mioritas), kelompok perwakilan pengurus organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial ekonomi serta pemerintahan desa (aparatur desa dan anggota BPD) di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Dalam kurun waktu 6 bulan terhitung bulan Januari – Juni 2019 masa pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi dalam rangka bagian dari sosialisasi, monitoring dan controlling terkait dengan proses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi anggaran dana desa. Informasi secara rinci tentang pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Simulasi dan Pendampingan Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi

No.	Jenis Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan
1.	Pelatihan peningkatan pemahaman terkait UU Desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan warga masyarakat • Perwakilan kelompok tani • Perwakilan kelompok rentan • Perwakilan pengurus organisasi sosial/ kemasyarakatan • Aparatur desa 	Januari 2019
2.	Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga.	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan warga masyarakat • Perwakilan kelompok tani • Perwakilan kelompok rentan • Perwakilan pengurus organisasi sosial/ kemasyarakatan • Aparatur desa 	Februari 2019
3.	Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya tata cara pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan warga masyarakat • Perwakilan kelompok tani • Perwakilan kelompok rentan • Perwakilan pengurus organisasi sosial/ kemasyarakatan • Aparatur desa 	Maret 2019
4.	Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan warga masyarakat • Perwakilan kelompok tani • Perwakilan kelompok rentan • Perwakilan pengurus organisasi sosial/ kemasyarakatan • Aparatur desa 	April 2019
5.	Simulasi atau praktik penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif melalui pengelolaan anggaran dana desa	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan warga masyarakat • Perwakilan kelompok tani • Perwakilan kelompok rentan • Perwakilan pengurus organisasi sosial/ kemasyarakatan • Aparatur desa 	Mei 2019
6.	Pendampingan terhadap Aparatur desa terkait pengelolaan anggaran dana desa	<ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan warga masyarakat • Aparatur desa 	Mei – Juni 2019

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pemahaman terkait undang-undang desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dilaksanakan bulan Januari 2019 dan dihadiri oleh beberapa perwakilan warga masyarakat yang terdiri dari perwakilan warga, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok rentan, perwakilan pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumber yang dihadirkan adalah

tenaga pengajar/ dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang memiliki fokus terhadap kajian pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemetaan sumber daya potensial desa dalam meningkatkan perekonomian warga dilaksanakan bulan Februari 2019 dan dihadiri oleh beberapa perwakilan warga masyarakat yang terdiri dari perwakilan warga, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok rentan, perwakilan pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumber yang dihadirkan adalah tenaga pengajar/ dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang memiliki fokus terhadap kajian Manajemen Sumber Daya Manusia dan politik lokal.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya tata cara pengeloan, perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan keuangan desa dilaksanakan bulan Maret 2019 dan dihadiri oleh beberapa perwakilan warga masyarakat yang terdiri dari perwakilan warga, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok rentan, perwakilan pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumber yang dihadirkan adalah tenaga pengajar/ dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang memiliki fokus terhadap kajian tata kelola pemerintahan dan *Good Governance*.

Pelaksanaan Pelatihan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa dilaksanakan bulan April 2019 dan dihadiri oleh beberapa perwakilan warga masyarakat yang terdiri dari perwakilan warga, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok rentan, perwakilan pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan dan aparatur desa. Narasumber yang dihadirkan adalah tenaga pengajar/ dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang memiliki fokus terhadap kajian tata kelola pemerintahan dan *Good Governance*.

Pelaksanaan Simulasi atau praktik penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif dan pendampingan terhadap Aparatur desa terkait pengelolaan anggaran dana desa dilaksanakan pada 2 bulan terakhir yaitu Mei dan Juni 2019. Dalam metode ini aparatur desa dan perwakilan kelompok masyarakat dihadirkan dan diberikan arahan simulasi atau praktik tata cara pengelolaan anggaran dana desa yang partisipatif dan akuntabel.

Tahapan-tahapan periodisasi agenda sosialisasi, monitoring dan controlling pendampingan dilakukan secara bertahap karena diharapkan masyarakat desa dan aparatur desa mudah memahami secara berkala proses pengelolaan anggaran dana desa yang ada. Dalam praktik tahapan tersebut merupakan bagian dari periodisasi pembangunan desa yang mempertimbangkan partisipasi masyarakat secara *Bottom Up* dan diharapkan memberikan peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi yang positif terhadap masyarakat desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Terdapat beberapa indikator pencapaian yang digunakan untuk melihat terjadinya perkembangan peningkatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan serta proses perencanaan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan aparatur desa bukan hanya sekedar bersifat *Top Down* namun juga bersifat *Bottom Up*. Beberapa indikator tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Terbangunnya partisipasi dan komitmen masyarakat desa untuk ikut serta dan berani menyampaikan ide/ gagasan pada agenda-agenda desa baik secara formal dan informal khususnya dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa yang merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.
- b. Terbangunnya komitmen organisasi masyarakat desa untuk memulai dan mempraktikkan serta mendiskusikan tata cara perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban hasil pembangunan dengan mekanisme yang sesuai prosedur
- c. Terbangunnya komitmen aparat desa untuk terbuka, responsif dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan survei dengan pemberian angket terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dan aparatur desa yang notabene merupakan para peserta pelatihan dan pendampingan. Hal ini merupakan bagian dalam rangka monitoring dan controlling pihak penyelenggara untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemajuan masyarakat desa dalam memaknai konsep partisipasi masyarakat dan pengelolaan anggaran dana desa. Hasil survei dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Hasil survei Terkait Komitmen Untuk Terlibat Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

No	Kelompok Peserta Pelatihan	Jumlah	Hasil Survei (%)	
			Ya	Tidak
1	Perwakilan Warga Masyarakat	25	100	0
2	Perwakilan kelompok tani	35	90	10
3	Perwakilan masyarakat rentan	15	100	0
4	Perwakilan organisasi kemasyarakatan	40	100	0
5	Perwakilan Pemerintahan Desa	20	100	0
Total		135	98	2

Sumber: Data Primer Diolah, Desa Tanjung Lanjut, 2019

Berdasarkan data dalam Tabel 2 diketahui bahwa setelah mengikuti pelatihan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, sebagian mayoritas responden (98%) menyatakan berkomitmen untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam mengelola anggaran dana desa yang notabene terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan kategori peserta, seluruh peserta (100%) dari perwakilan pengurus organisasi kemasyarakatan, masyarakat rentan dan pemerintahan desa menyatakan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola anggaran dana desa tersebut. Adapun dari kelompok tani sebanyak 90 % (31 responden) berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola anggaran dana desa. Sedangkan sisanya 10% (4 responden) menyatakan tidak memiliki komitmen yang sama.

Instrumen lain yang digunakan untuk mengukur komitmen partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah telah terakomodasinya rencana pembangunan desa melalui anggaran dana desa pada draft sementara yang disusun secara partisipatif. Draft sementara tersebut dibuat bersama-sama oleh aparatur desa, masyarakat desa, perwakilan kelompok organisasi kemasyarakatan dan tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana program pembangunan desa yang langsung menyasar pada kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yang tersedia. Lebih jauh, tahapan-tahapan yang telah dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi dengan tema partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi berjalan baik. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman dan pengetahuan baru terhadap masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan sosialisasi, monitoring dan controlling pelatihan, praktik simulasi serta pendampingan yang dilakukan berpengaruh terhadap peningkatan komitmen aparatur desa dan masyarakat desa serta kelompok organisasi kemasyarakatan guna berpartisipasi aktif dalam membangun desa melalui pengelolaan anggaran dana desa. Ke depan, dengan anggaran dana desa yang terus meningkat diharapkan Desa Tanjung Lanjut dapat menjadi desa yang berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui rencana program pembangunan desa yang partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet, M. 2013. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- Susetiawan, D. C., Mulyono, and M. Y. Roniardin. 2018. Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4(1): 109-118. <http://doi.org/10.22146/jpkm.27512>
- Tjokromidjojo, B. 2015. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Erlangga
- Tumbe, S. M. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Penelitian Kebijakan dan Manajemen Publik 2(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.